

# ANALISIS KETERKAITAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN PERSONAL MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR

**Moh. Agung Setiawan**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya  
Jalan MT. Haryono 165 Malang  
mohagungs@gmail.com*

**Abstract:** *The aims of this research are to determine the condition of financial inclusion in the cities and regencies in East Java province, moreover to examine and analyze the influence of index of financial inclusion on personal financial behavior. Index of financial inclusion is measured through indicators of banking penetration, accessibility of banking, and the usage of bank account. Personal financial behavior is measured by using several indicators, namely budget creating, funding (financial resources), budget allocations, expenditures, and evaluation of money usage. This type of research is explanatory with a quantitative approach. Population data in this research are 38 cities/regencies in East Java province. The sample used are 31 cities/regencies consist of 9 cities and 22 regencies were taken using stratified random sampling technique. The analytical method used is the analysis of the index of financial inclusion and simple linear regression analysis. The result of this research showed that the index of financial inclusion of each city and district in East Java province is different. The majority of cities have a high index of financial inclusion while the regencies have a low index of financial inclusion. The result also prove that the index of financial inclusion has significant positive impact on personal financial behavior.*

**Keywords:** *Access of Financial Services, Index of Financial Inclusion, Financial Inclusion, Personal Financial Behavior*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal. Indeks inklusi keuangan diukur melalui indikator penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan, dan penggunaan rekening. Perilaku keuangan personal diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu membuat anggaran, pendanaan (sumber daya finansial), alokasi anggaran, pengeluaran, dan evaluasi penggunaan uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang ada adalah 38 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah 31 kota/kabupaten yang terdiri atas 9 kota dan 22 kabupaten diambil menggunakan teknik *stratified random sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda. Seluruh wilayah kota mayoritas memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi, sedangkan wilayah kabupaten memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan personal.

**Kata Kunci:** Akses Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan, Inklusi Keuangan, Perilaku Keuangan Personal

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan pernah mendapat apresiasi yang besar dari dunia internasional menduduki peringkat 3 sebagai negara yang tahan krisis moneter 2008 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Ironisnya pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut tidak berdampak baik ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014:1) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ini justru diikuti dengan meningkatnya kondisi pengangguran dan kemiskinan (*Macroeconomic Dashboard*, 2014). Indeks koefisien gini Indonesia juga justru memburuk dari tahun ke tahun, bahkan hingga akhir 2013 mencapai 4,1% (Bank Dunia, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ekonomi masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Padahal menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan Hadad dalam Wibowo (2014) literasi keuangan yang baik berarti menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan keuangan, sehingga dapat melengkapi individu dengan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Soetiono dalam Dewi (2014) tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Singapura,

Malaysia, dan Thailand. Di Malaysia, tingkat literasi keuangan masyarakatnya mencapai 66%, Singapura mencapai 98%, sedangkan Thailand mencapai angka 73%, sementara Indonesia masih pada angka 28%. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang pada umumnya sekitar 60% berada pada daerah pedesaan (Dewi, 2014). Data hasil survei Bank Dunia yang dikutip Agus (2014) menunjukkan bahwa daerah yang terletak di daerah pedesaan cenderung lebih sulit mengakses jasa keuangan di lembaga keuangan formal seperti bank, berbeda dengan wilayah perkotaan yang cenderung lebih cepat dalam mengakses. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengakses layanan jasa keuangan pada daerah terpencil memang tidak mudah, sehingga banyak dari masyarakatnya masuk dalam kategori *unbanked people*. Masyarakat dalam kategori tersebut adalah masyarakat yang memiliki *financial literacy* yang rendah, sehingga perilaku keuangan personalnya juga tidak baik. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mengenal produk perbankan.

Untuk mengatasi keterbatasan akses layanan jasa keuangan tersebut, maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan inklusi keuangan. Program ini berupaya untuk memperluas akses layanan jasa keuangan terhadap masyarakat secara luas dan menyeluruh dengan tujuan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di dalam pembangunan ekonomi Indonesia, perbankan memiliki peran yang besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan inklusi keuangan, mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80% (Bank Indonesia, 2014:6). Didukung pernyataan Chakravarty dan Pal (2010:1) yang justru mendefinisikan inklusi keuangan adalah selayaknya inklusi

perbankan. Maka dari itu, diwujudkanannya program inklusi keuangan sebagai upaya perluasan akses jasa keuangan ini seharusnya mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam menyentuh produk-produk perbankan, sehingga dapat berdampak pada perilaku keuangan personal masyarakat yang lebih baik.

Sarma (2012:14-17) di dalam penelitiannya telah mengembangkan alat ukur untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusi keuangan. Perumusan indeks ini memang didasarkan pada indikator perbankan, antara lain: indikator penetrasi perbankan, indikator aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), dan indikator *usage* (penggunaan) rekening di masyarakat. Indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan. Hal ini dapat menunjukkan *financial awareness* (kesadaran keuangan) pada masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan. Indikator aksesibilitas perbankan menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apabila industri perbankan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas, maka masyarakat akan mudah untuk mengenal dan memanfaatkan produk perbankan, sehingga jelas hal ini dapat berdampak pada perilaku keuangan personal masyarakat tersebut. Untuk indikator *usage* (penggunaan) rekening ini menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat mampu menggunakan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini dapat menjelaskan perilaku masyarakat dalam mengelola finansial di dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk perbankan tersebut.

Pemaparan indeks inklusi keuangan di atas dapat menjelaskan bahwa tingkat

inklusi keuangan akan mampu mempengaruhi perilaku keuangan personal masyarakat. Perilaku keuangan personal ini didefinisikan oleh Nababan dan Isfenti (2013:5) adalah sikap dan tata cara seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada padanya. Ardiani (2011:120) menjelaskan lebih detail lagi tentang mengelola keuangan, yaitu proses yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan dengan disiplin, dan melakukan evaluasi atau revisi jika diperlukan. Maka dari itu, di dalam mengelola keuangan personal diperlukan peran industri perbankan sebagai salah satu roda penggerak dalam aktivitas perekonomian sehari-hari termasuk untuk aktivitas keuangan pada lingkup rumah tangga, seperti untuk memperoleh alternatif sumber daya keuangan karena kekurangan finansial atau untuk tujuan aktivitas produktif seperti keperluan modal usaha. Selain itu juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat melalui produk tabungan dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian tertentu. Aktivitas seperti ini secara tidak langsung telah memberi pelajaran bagi masyarakat untuk memiliki perilaku keuangan personal yang baik dan dapat mengelola keuangan secara cerdas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pernyataan terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal didukung oleh pernyataan Allen *et al.* (2012:34) yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat membawa banyak manfaat kesejahteraan untuk individu. Pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengembangkan inklusi keuangan dapat meningkatkan persepsi orang yang merasa bahwa jasa keuangan (perbankan) ada dalam jangkauan mereka. Rakhmindyarto dan Syaifullah (2014:1) juga mengatakan bahwa sistem keuangan yang inklusif akan mampu

memberdayakan individu untuk mampu mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, sehingga sangat membantu masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasikan kekayaannya, dan mengelola risiko, serta upaya untuk keluar dari kemiskinan. Ditambahkan oleh Agrawal (2008:1) yang mengatakan bahwa inklusi keuangan ini adalah suatu proses untuk menjamin masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan secara menyeluruh seperti tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran, dan lain-lain.

Pada penelitian Bintan (2013:18) juga mengatakan bahwa semakin inklusif sistem keuangan suatu wilayah, maka wilayah tersebut telah berhasil mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan dalam mengakses jasa keuangan, seperti pengetahuan keuangan yang kurang, kondisi geografis, kurangnya informasi dan pengetahuan terkait perbankan, kendala administrasi, dan persepsi yang tidak baik terhadap lembaga keuangan. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan pernyataan Prof. Ahmad Erani Yustika dalam Musahadah (2014) yang menyampaikan bahwa permasalahan terkait keuangan khususnya pada cara mengelola keuangan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, seperti persepsi terhadap lembaga keuangan dan sulitnya akses jasa keuangan. Kapoor *et al.* (2007:14-15) juga menyatakan bahwa keberadaan *financial institution* (lembaga keuangan) seperti perbankan yang menyediakan layanan keuangan akan meningkatkan aktivitas keuangan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Pernyataan-pernyataan di atas telah menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki sistem keuangan yang inklusif telah berhasil menjangkau masyarakatnya untuk dapat mengakses ke layanan jasa

keuangan seperti perbankan sehingga mereka mampu memanfaatkan produk - produk perbankan untuk mengelola kondisi keuangannya dengan tujuan mencapai hidup yang lebih sejahtera. Maka dari itu, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa indeks inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan personal.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Bahkan, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur memiliki luas wilayah mencapai 47.799,75 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 37.269.885 jiwa yang terbagi dalam 9 kota dan 29 kabupaten (Kemendagri, 2013). Dilihat dari topografinya, Provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi tiga dataran, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut, dataran sedang dengan ketinggian antara 45 - 100 meter di atas permukaan laut, dan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 45 meter di atas permukaan laut (jatim.bps.go.id). Beberapa wilayah kota dan kabupatennya berada pada area pegunungan dan lautan. Hal ini membuktikan bahwa kondisi geografis kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, kondisi geografis yang berbeda-beda pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur ini jelas akan mempengaruhi kondisi ketersediaan layanan jasa keuangan pada setiap wilayah. Selain itu juga persepsi serta perilaku masyarakatnya dalam mengelola keuangan yang berbeda-beda pula. Data yang dirilis oleh Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur dalam Sri (2014) diasumsikan bahwa kepemilikan rekening perbankan pada warga Jawa Timur ini masih rendah, presentase jumlah rekening

DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan jumlah penduduk di Jawa Timur masih mencapai 45%. Hal ini menunjukkan kesadaran keuangan masyarakatnya masih rendah. Ditambah lagi dengan kondisi inklusi keuangan di Jawa Timur yang masih terbatas.

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat dengan kondisi geografis yang cenderung mudah mengakses layanan jasa keuangan sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan produk - produk perbankan. Maka dari itu, seharusnya mereka memiliki perilaku keuangan personal yang baik, tetapi ketersediaan akses layanan jasa keuangan tersebut tidak dapat menjamin bahwa masyarakat akan memiliki kesadaran keuangan untuk memiliki rekening pada bank, bahkan jumlah kepemilikan rekening tersebut juga masih belum dapat mengindikasikan bahwa seseorang tersebut telah memiliki perilaku keuangan personal yang baik. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh inklusi keuangan suatu wilayah terhadap perilaku keuangan personal masyarakatnya. Sejauh ini, masih belum dijumpai penelitian yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui pengaruh tingkat inklusi keuangan suatu wilayah terhadap perilaku keuangan personal masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil bukti empiris tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi inklusi keuangan setiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan menguji serta menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori. Menurut Sugiyono (2011:37) penelitian eksplanatori merupakan penelitian dengan maksud

untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Toto dan Nanang (2012:56) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui salah satu aspek dari sasaran penelitian secara meluas walaupun pengumpulan datanya menggunakan teknik pengambilan sampel. Di dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur sejumlah 38 kota/kabupaten. Berdasarkan rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan 8% didapatkan sampel sejumlah 31 kota/kabupaten yang diambil dengan teknik *disproportionate stratified random sampling* yang terdiri atas 9 kota dan 22 kabupaten. Begitu pula pada responden masyarakat dewasa di Provinsi Jawa Timur sejumlah 27.819.329 diambil sampel dengan teknik *proportionate stratified random sampling* sejumlah total 165 responden yang mewakili dari 31 kota/kabupaten. Berikut adalah rincian jumlah sebaran sampel responden masyarakat pada masing-masing kota dan kabupaten:

**Tabel 1. Sebaran Sampel Responden Kota dan Kabupaten**

No.	Kota / Kabupaten	Sampel
1.	Kota Batu	2
2.	Kota Surabaya	13
3.	Kota Mojokerto	1
4.	Kota Malang	5
5.	Kota Pasuruan	2
6.	Kota Probolinggo	2
7.	Kota Blitar	2
8.	Kota Kediri	2
9.	Kota Madiun	2
10.	Kab. Gresik	6
11.	Kab. Sidoarjo	9
12.	Kab. Mojokerto	5
13.	Kab. Jombang	6
14.	Kab. Sumenep	5

No.	Kota / Kabupaten	Sampel
15.	Kab. Bangkalan	4
16.	Kab. Banyuwangi	7
17.	Kab. Jember	11
18.	Kab. Malang	11
19.	Kab. Pasuruan	7
20.	Kab. Lumajang	5
21.	Kab. Kediri	7
22.	Kab. Nganjuk	5
23.	Kab. Tulungagung	5
24.	Kab. Blitar	6
25.	Kab. Madiun	4
26.	Kab. Ngawi	4
27.	Kab. Magetan	4
28.	Kab. Ponorogo	5
29.	Kab. Bojonegoro	6
30.	Kab. Tuban	6
31.	Kab. Lamongan	6

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban responden masyarakat di setiap kota/kabupaten yang dikumpulkan dengan teknik kuesioner, data ini untuk kebutuhan data yang diolah pada variabel terikat. Untuk data sekunder diperoleh dari beberapa instansi publik seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang dan Badan Pusat Statistik Malang, jurnal yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, data ini untuk kebutuhan data yang diolah pada variabel bebas.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu indeks inklusi keuangan dan perilaku keuangan personal.

1. Indeks inklusi keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan melalui indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada sektor perbankan. Indeks inklusi keuangan ini nantinya digunakan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahan variabel terikatnya. Perhitungan indeks inklusi keuangan ini dilakukan berdasarkan beberapa indikator perbankan, yaitu: penetrasi perbankan, aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), dan *usage* (penggunaan) rekening perbankan. Untuk menghitung indeks inklusi keuangan, diperlukan terlebih dahulu menghitung indeks dari masing-masing indikator tersebut: a) Untuk menghitung indeks penetrasi perbankan, terlebih dahulu menghitung jumlah rekening deposit yang dimiliki masyarakat pada setiap 1.000 populasi dewasa di masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian. b) Untuk menghitung indeks aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), terlebih dahulu menghitung jumlah kantor bank yang ada pada setiap 100.000 populasi penduduk desa di masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian. c) Untuk menghitung indeks *usage* (penggunaan) rekening, terlebih dahulu menghitung jumlah total dana simpanan (DPK), dana pinjaman, dan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian. Kemudian total dana deposit ditambahkan dengan total dana kredit, setelah itu dibagi dengan nilai PDRB yang ada. Apabila nilai indeks dari masing-masing indikator pada setiap kota dan kabupaten pada sampel penelitian telah diketahui. Maka berikutnya nilai indeks dari masing-masing indikator tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai indeks inklusi keuangan pada setiap kota/kabupaten.

2. Perilaku keuangan personal adalah sebuah proses seorang individu dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang dimilikinya mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Perilaku keuangan personal ini nantinya dijadikan

sebagai variabel terikat yang akan dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, perilaku keuangan personal seseorang diukur melalui beberapa indikator antara lain: mengontrol pengeluaran harian, pembayaran tagihan, perencanaan keuangan masa depan, penyediaan uang untuk pribadi dan keluarga, dan tabungan (Ida dan Cinthia, 2010:141). Mengukur perilaku keuangan juga dapat menggunakan beberapa indikator lain, yaitu: membayar tagihan, membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dana pengeluaran tak terduga, menabung secara periodik, dan berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan pembelian (Nababan dan Isfenti, 2013:11). Perusahaan Layanan Konsultan Perencanaan Keuangan Finansialku membagi perilaku keuangan personal menjadi lima komponen, yaitu membuat anggaran, mencatat pengeluaran harian, audit bulanan, membuat dan melakukan perencanaan keuangan, dan mengecek perkembangan kondisi finansial. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengukur perilaku keuangan personal itu dapat didasarkan melalui beberapa indikator mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi di akhir periode tertentu. Maka dari itu, untuk mengukur perilaku keuangan personal dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: 1) Membuat anggaran, 2) Pendanaan (sumber daya finansial), 3) Alokasi anggaran, 4) Pengeluaran (penggunaan uang), dan 5) Evaluasi penggunaan uang. Alat ukur yang digunakan dalam variabel ini adalah skala likert.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis indeks inklusi keuangan atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excell

2010 dan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 21.00. Sebelum menghitung indeks inklusi keuangan ini, terlebih dahulu diawali dengan mengukur indeks dari masing-masing indikator yang ada dengan menggunakan persamaan berikut (Sarma, 2012:10):

$$di = wi \frac{Ai - mi}{Mi - mi}$$

$wi$ : bobot untuk indikator  $i$ ,  $0 \leq wi \leq 1$

$Ai$ : nilai terkini dari peubah  $i$

$mi$ : nilai min (batas bawah) dari peubah  $i$

$Mi$ : nilai maks (batas atas) dari peubah  $i$

Persamaan di atas tersebut akan menghasilkan nilai  $0 < di < 1$ . Semakin tinggi nilai  $di$ , semakin tinggi pula perolehan wilayah di indikator  $i$ . Jika terdapat  $n$  indikator dari inklusi keuangan yang dihitung, maka perolehan suatu wilayah dari indikator tersebut direpresentasikan dengan titik  $X = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$  pada ruang  $n$ -indikator. Di dalam ruang  $n$ -indikator, titik  $O = (0, 0, 0, \dots, 0)$  menunjukkan titik kondisi inklusi yang buruk, sedangkan titik  $W = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$  menunjukkan kondisi yang ideal dalam setiap indikator. Letak titik  $X$ ,  $O$ , dan  $W$  merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah. Semakin besar jarak antara titik  $O$  dengan titik  $X$ , semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan. Semakin kecil jarak antara titik  $X$  dengan titik  $W$ , semakin tinggi tingkat inklusi keuangan. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara  $W$  dan  $O$  agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu, nilai IFI akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, maka sistem keuangan semakin inklusif.

Jika jarak antara titik  $O$  dengan titik  $X$  dilambangkan dengan  $X_1$  dan jarak antara titik  $X$  dengan titik  $W$  dilambangkan dengan  $X_2$  (Sarma, 2012:11), yaitu:

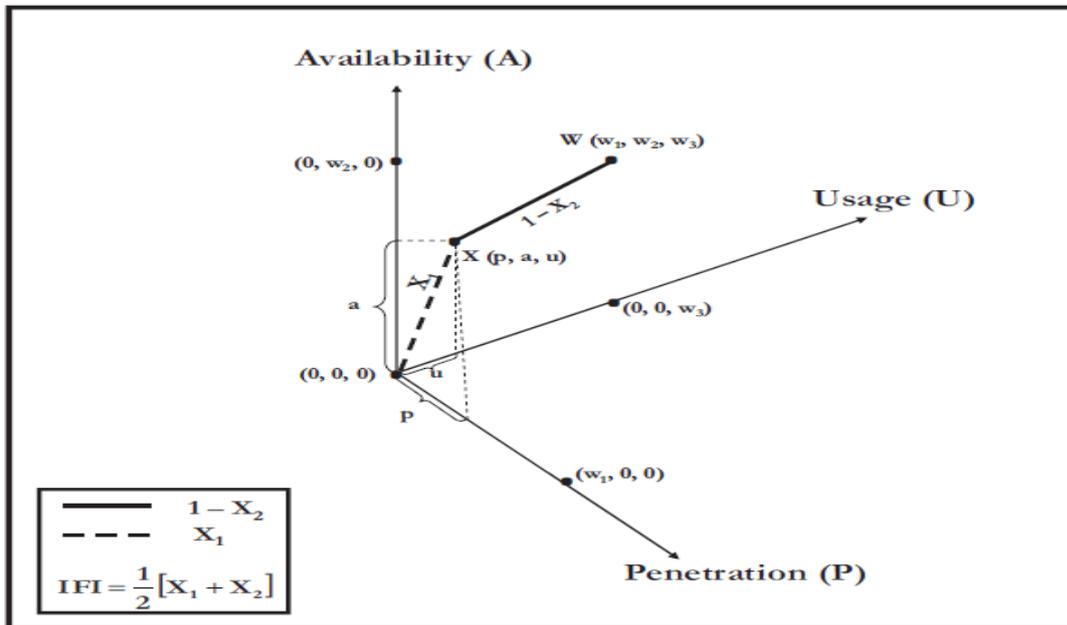
$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2}}$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + \dots + (w_n - d_n)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2}}$$

Maka nilai IFI adalah rata-rata keduanya (Sarma, 2012:11),

$$IFI = \frac{1}{2} (X_1 + X_2)$$

Apabila digambarkan dalam bentuk ruang tiga dimensi, maka IFI (Indeks Inklusi keuangan) adalah seperti sebagai berikut:



Sumber: Sarma, 2012

### Gambar 1 Penjelasan Tiga Indikator dalam IFI

Hasil perhitungan nilai indeks inklusi keuangan (IFI) pada setiap kota/kabupaten akan berada di antara 0 dan 1. Penelitian Bintang (2013:11) mengasumsikan seluruh indikator memiliki bobot yang sama besar, masing-masing indikator memiliki bobot sebesar 1. Memiliki bobot yang sama ini artinya adalah setiap indikator memiliki peranan yang sama dalam menentukan tingkat inklusi keuangan. Di dalam perhitungan IFI, dibutuhkan nilai tetap dari  $M_i$  (batas atas) dan  $m_i$  (batas bawah) untuk setiap indikator dan agar dapat membandingkan IFI antar wilayah kota/kabupaten, maka batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Penelitian ini menggunakan batas bawah yang digunakan oleh Sarma (2012:17)

sehingga batas bawah yang digunakan untuk setiap indikator adalah 0, sedangkan untuk menentukan batas atas setiap peubah, ditentukan oleh hasil dari sebaran masing-masing peubah.

Apabila data terkait indeks inklusi keuangan dan perilaku keuangan personal tersebut sudah terkumpul, maka berikutnya adalah dilakukan analisis regresi linier sederhana. Namun sebelumnya data responden dari variabel perilaku keuangan personal harus melalui uji instrumen validitas dan uji instrumen reliabilitas. Setelah itu, data yang ada kemudian juga harus melalui uji asumsi normalitas dan uji asumsi heteroskedastisitas. Terakhir adalah dilakukan analisis regresi linier dan uji hipotesis melalui uji t (parsial).

## HASIL ANALISIS

### Indikator Penetrasi Perbankan

Sistem keuangan dapat dikatakan inklusif apabila memiliki pengguna sebanyak mungkin, dengan kata lain sistem keuangan harus dapat menjangkau secara luas para penggunanya. Instrumen untuk mengukur tingkat indikator penetrasi perbankan adalah jumlah kepemilikan rekening deposit per 1.000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing kota/kabupaten.

**Tabel 2. Jumlah Rekening Deposit Per 1.000 Populasi Dewasa**

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah
1	Kota Batu	357
2	Kota Surabaya	2490
3	Kota Mojokerto	3620
4	Kota Malang	1916
5	Kota Pasuruan	1225
6	Kota Probolinggo	965
7	Kota Blitar	2210
8	Kota Kediri	1714
9	Kota Madiun	2814
10	Kab Gresik	794
11	Kab Sidoarjo	831
12	Kab Mojokerto	330
13	Kab Jombang	651
14	Kab Sumenep	365
15	Kab Bangkalan	718
16	Kab Banyuwangi	684
17	Kab Jember	618
18	Kab Malang	634
19	Kab Pasuruan	413
20	Kab Lumajang	549
21	Kab Kediri	742
22	Kab Nganjuk	622
23	Kab Tulungagung	740
24	Kab Blitar	554
25	Kab Madiun	772
26	Kab Ngawi	674
27	Kab Magetan	767
28	Kab Ponorogo	792
29	Kab Bojonegoro	575
30	Kab Tuban	484
31	Kab Lamongan	705

Sumber: Bank Indonesia Malang diolah, 2014

Angka penetrasi perbankan terbesar ada pada Kota Mojokerto yaitu pada angka 3.620 per 1.000 populasi dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang di Kota Mojokerto rata-rata memiliki 3-4 rekening. Sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Mojokerto yaitu pada angka 330. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 1.000 populasi yang ada di wilayah tersebut hanya ada sejumlah 330 yang memiliki rekening.

### Indikator Aksesibilitas Jasa Keuangan (Perbankan)

Salah satu indikator lain untuk mengukur sistem keuangan yang inklusif adalah dengan mengetahui tingkat kemampuan industry perbankan untuk menjangkau jumlah penduduk yang ada di sekitarnya. Indikator ini diukur melalui jumlah kantor bank yang terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu per 100.000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing kota/kabupaten.

**Tabel 3. Jumlah Kantor Bank Per 100.000 Populasi Dewasa**

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah
1	Kota Batu	9
2	Kota Surabaya	45
3	Kota Mojokerto	28
4	Kota Malang	18
5	Kota Pasuruan	11
6	Kota Probolinggo	13
7	Kota Blitar	15
8	Kota Kediri	17
9	Kota Madiun	24
10	Kab Gresik	6
11	Kab Sidoarjo	2
12	Kab Mojokerto	2
13	Kab Jombang	3
14	Kab Sumenep	1
15	Kab Bangkalan	1
16	Kab Banyuwangi	5
17	Kab Jember	4
18	Kab Malang	4
19	Kab Pasuruan	2
20	Kab Lumajang	2

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah
21	Kab Kediri	2
22	Kab Nganjuk	6
23	Kab Tulungagung	6
24	Kab Blitar	2
25	Kab Madiun	3
26	Kab Ngawi	4
27	Kab Magetan	4
28	Kab Ponorogo	3
29	Kab Bojonegoro	5
30	Kab Tuban	2
31	Kab Lamongan	3

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Tingkat aksesibilitas bank tertinggi ada pada Kota Surabaya dengan angka 45. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 45 kantor bank (kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu) pada setiap 100.000 populasi dewasa di Kota Surabaya. Sedangkan wilayah dengan tingkat aksesibilitas bank terendah ada pada wilayah Madura,

khususnya pada Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan dengan angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut sangat minim tersedia kantor bank.

#### **Indikator Usage (Penggunaan) Rekening**

Indikator *usage* (penggunaan rekening) ini diartikan sebagai bentuk fungsi dari kepemilikan rekening yang digunakan untuk betransaksi dalam sistem keuangan. Hal ini didasari oleh faktor jumlah kepemilikan rekening masih belum dapat merepresentasikan bahwa akan digunakan secara maksimal dalam produk-produk perbankan karena hanya sekedar memiliki. Alat ukur yang digunakan untuk melihat tingkat indikator ini adalah melalui jumlah dana simpanan (dana pihak ketiga atau DPK) dan dana pinjaman terhadap PDRB pada masing-masing kota/kabupaten.

**Tabel 4. Jumlah DPK dan Pinjaman terhadap PDRB**

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah DPK terhadap PDRB (%)	Jumlah Pinjaman terhadap PDRB (%)
1	Kota Batu	15	14
2	Kota Surabaya	63	43
3	Kota Mojokerto	98	56
4	Kota Malang	41	28
5	Kota Pasuruan	52	58
6	Kota Probolinggo	24	31
7	Kota Blitar	63	37
8	Kota Kediri	10	12
9	Kota Madiun	52	40
10	Kab Gresik	19	67
11	Kab Sidoarjo	16	37
12	Kab Mojokerto	7	27
13	Kab Jombang	19	23
14	Kab Sumenep	9	12
15	Kab Bangkalan	24	20
16	Kab Banyuwangi	14	20
17	Kab Jember	20	23
18	Kab Malang	20	24
19	Kab Pasuruan	13	41
20	Kab Lumajang	13	14
21	Kab Kediri	27	46
22	Kab Nganjuk	17	19

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah DPK terhadap PDRB (%)	Jumlah Pinjaman terhadap PDRB (%)
23	Kab Tulungagung	19	17
24	Kab Blitar	18	19
25	Kab Madiun	19	23
26	Kab Ngawi	19	26
27	Kab Magetan	17	24
28	Kab Ponorogo	32	28
29	Kab Bojonegoro	9	14
30	Kab Tuban	11	16
31	Kab Lamongan	19	22

Sumber: Bank Indonesia Malang diolah, 2014 dan BPS Kota/Kabupaten diolah, 2014

Data tersebut menunjukkan ada beberapa wilayah dengan jumlah DPK yang lebih besar dibandingkan jumlah dana pinjamannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kota/kabupaten yang belum memanfaatkan dana simpanan (DPK) yang ada untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit secara produktif, sehingga mampu menunjang banyak sektor perekonomian di wilayah tersebut.

### Hasil Analisis Indeks Inklusi Keuangan

Nilai dari indikator-indikator yang ada tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai indeks dari masing-masing indikator tersebut. Selanjutnya nilai indeks masing-masing indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur nilai indeks inklusi keuangan. Berikut adalah rangkuman data dari keseluruhan indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks inklusi keuangan ini:

**Tabel 5. Data Untuk Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan**

Indikator	Penetrasi Perbankan	Aksesibilitas Perbankan	Usage (Penggunaan)
Item	Jumlah rekening di bank per 1.000 populasi dewasa	Jumlah kantor bank per 100.000 populasi dewasa	Proporsi jumlah DPK & pinjaman terhadap PDRB
Bobot ( $W_i$ )	1	1	1
Batas Min ( $m_i$ )	0*	0*	0*
Batas Maks ( $M_i$ )	3.620	45	154%

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

\*dalam penelitian Sarma (2012)

Penentuan nilai maksimum (batas atas) dan nilai minimum (batas bawah) yang digunakan adalah berdasarkan data sebaran sampel yang diobservasi yaitu sejumlah 31 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, maka dari itu nilai indeks inklusi keuangan ini hanya menunjukkan nilai perbandingan inklusi keuangan antar 31 kota/kabupaten saja. Namun, apabila jumlah observasi atau unit analisis ditambahkan ke beberapa wilayah di luar Provinsi Jawa Timur,

mungkin saja hasil analisis indeks inklusi keuangan yang muncul akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengaruh nilai batas atas dan batas bawah yang digunakan untuk menghitung nilai indeks tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Berikut adalah nilai indeks dari setiap indikator dan nilai indeks inklusi keuangan pada masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 6. Indeks Inklusi Keuangan Kota dan Kabupaten  
di Wilayah Provinsi Jawa Timur**

No.	Kota / Kabupaten	Indeks Penetrasi Bank	Indeks Akses Bank	Indeks <i>Usage</i> Rekening	Indeks Inklusi Keuangan
1	Kota Batu	0,0988	0,2006	0,1886	0,1651
2	Kota Surabaya	0,6878	0,9835	0,6867	0,7714
3	Kota Mojokerto	0,9999	0,6087	0,9970	0,8309
4	Kota Malang	0,5294	0,3935	0,4508	0,4581
5	Kota Pasuruan	0,3385	0,2456	0,7197	0,4396
6	Kota Probolinggo	0,2665	0,2785	0,3541	0,3004
7	Kota Blitar	0,6105	0,3261	0,6485	0,5273
8	Kota Kediri	0,4735	0,3803	0,1456	0,3398
9	Kota Madiun	0,7774	0,5197	0,5949	0,6275
10	Kab. Gresik	0,2192	0,1199	0,5564	0,3131
11	Kab. Sidoarjo	0,2297	0,0489	0,3419	0,2186
12	Kab. Mojokerto	0,0911	0,0431	0,2162	0,1258
13	Kab. Jombang	0,1799	0,0696	0,2692	0,1800
14	Kab. Sumenep	0,1007	0,0273	0,1353	0,0927
15	Kab. Bangkalan	0,1982	0,0316	0,2863	0,1836
16	Kab. Banyuwangi	0,1890	0,1036	0,2250	0,1755
17	Kab. Jember	0,1708	0,0815	0,2766	0,1830
18	Kab. Malang	0,1753	0,0866	0,2853	0,1890
19	Kab. Pasuruan	0,1142	0,0472	0,3495	0,1871
20	Kab. Lumajang	0,1517	0,0502	0,1767	0,1310
21	Kab. Kediri	0,2050	0,0434	0,4731	0,2594
22	Kab. Nganjuk	0,1719	0,1267	0,2337	0,1795
23	Kab. Tulungagung	0,2044	0,1240	0,2356	0,1902
24	Kab. Blitar	0,1532	0,0339	0,2344	0,1497
25	Kab. Madiun	0,2133	0,0604	0,2706	0,1893
26	Kab. Ngawi	0,1863	0,0768	0,2940	0,1933
27	Kab. Magetan	0,2118	0,0819	0,2630	0,1913
28	Kab. Ponorogo	0,2189	0,0661	0,3906	0,2376
29	Kab. Bojonegoro	0,1590	0,1022	0,1542	0,1394
30	Kab. Tuban	0,1336	0,0543	0,1729	0,1244
31	Kab. Lamongan	0,1947	0,0691	0,2611	0,1817

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

### Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Data yang ada telah melalui dan lolos uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji hipotesis melalui analisis regresi linier sederhana. Analisis

tersebut menggunakan persamaan model regresi *standardized coefficients* karena data yang digunakan adalah data ordinal yang diukur melalui skala likert. Berikut adalah persamaan regresi linier yang dihasilkan:

$$\hat{Y} = 0,579 X + e$$

$\hat{Y}$  = Variabel perilaku keuangan personal yang nilainya akan diprediksi oleh variabel indeks inklusi keuangan

b = Koefisien regresi variabel indeks inklusi keuangan sebesar 0,579 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan dan berpengaruh positif terhadap variabel perilaku keuangan personal

Nilai Sig. t variabel indeks inklusi keuangan yang dihasilkan adalah 0,001 sehingga  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima yang menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan personal. Nilai koefisien determinasi *R-Square* ( $R^2$ ) yang dihasilkan sebesar 0,335 menunjukkan bahwa kontribusi variabel indeks inklusi keuangan mempengaruhi variabel perilaku keuangan personal sebesar 33,5%. Sisanya yang sebesar 66,5% tersebut dapat dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan angka 0,579. Hal ini mengartikan bahwa keeratan hubungan antara variabel indeks inklusi keuangan dan variabel perilaku keuangan personal memiliki hubungan yang cukup kuat.

## PEMBAHASAN

### Indeks Inklusi Keuangan Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data hasil analisis indeks inklusi keuangan menunjukkan bahwa perkembangan sektor perbankan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda. Pembangunan sektor perbankan di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh kota kecuali Kota Batu menempati posisi teratas dalam indeks inklusi keuangan, nilainya lebih dari 0,3. Pada Kota Batu hanya 0,1651, bahkan angka tersebut ada di bawah beberapa

kabupaten. Nilai indeks masing-masing indikator Kota Batu memang menunjukkan angka rendah. Kondisi geografis dan demografis Kota Batu memang kurang mampu menunjang industri perbankan untuk masuk dan menjangkau masyarakat Kota Batu secara keseluruhan dengan baik. Berbeda dengan kota-kota yang lain karena wilayahnya cenderung mudah diakses.

Angka indeks inklusi keuangan tertinggi ada pada Kota Mojokerto. Berdasarkan nilai indeks dari masing-masing indikator memang menunjukkan bahwa Kota Mojokerto sangat unggul pada indikator penetrasi perbankan. Pada indikator akses bank pun demikian, walaupun sebenarnya total kantor bank (KP, KC, KCP) yang ada di Kota Mojokerto tidak terlalu banyak, namun dikarenakan jumlah penduduk masyarakat dan luas wilayahnya yang paling kecil di Provinsi Jawa Timur, maka industri perbankan benar-benar dapat menjangkau masyarakat Kota Mojokerto secara menyeluruh. Kondisi demografis ini sangat jauh berbeda dengan yang ada di Kota Surabaya, walaupun tingkat aksesibilitas perbankan di Kota Surabaya adalah yang terbesar, namun jumlah penduduk Kota Surabaya merupakan yang paling besar angkanya, sehingga jumlah kantor bank yang ada di Kota Surabaya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Kota Mojokerto untuk menjangkau masyarakatnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan, data hasil indeks inklusi keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar kota serta beberapa kabupaten telah mampu meminimalisir hambatan-hambatan pada masyarakatnya dalam mengakses jasa keuangan, khususnya pada lembaga keuangan formal seperti pada industri perbankan. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa wilayah yang mampu meminimalisir hambatan-hambatan akses jasa keuangan tersebut mampu mengeluarkan

masyarakatnya dari kemiskinan. Wilayah dengan indeks inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan tingkat kemiskinanannya rendah. Berdasarkan BPS Jawa Timur (2014) menunjukkan data bahwa Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Madiun memiliki tingkat presentase kemiskinan yang rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kota Mojokerto 6,63%; Kota Surabaya 5,97%; dan Kota Madiun 5%. Begitu pula terjadi pada beberapa wilayah lainnya.

Angka indeks inklusi keuangan yang terendah berada pada Kabupaten Sumenep, angka indeks inklusi keuangannya hanya pada posisi 0,0927. Berdasarkan nilai indeks dari masing-masing indikator, Kabupaten Sumenep memang mayoritas menduduki posisi akhir. Pada indikator penetrasi perbankan berada pada posisi tiga terbawah setelah Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Pada indeks aksesibilitas perbankan Kabupaten Sumenep bahkan menempati posisi terbawah dengan hanya memiliki 1 kantor bank dalam setiap 100.000 populasi dewasanya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perbankan dalam menjangkau masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan tersebut lemah, sehingga kurang mampu secara luas memperkenalkan produk-produk perbankan, salah satunya dibuktikan dengan jumlah kepemilikan rekening yang rendah. Begitu pula pada indikator *usage* (penggunaan), posisi Kabupaten Sumenep dalam bertransaksi melalui produk perbankan untuk berkontribusi terhadap nilai PDRB-nya juga menempati posisi yang paling rendah. Hal ini juga dapat disebabkan karena faktor kepemilikan rekening yang minim tersebut. Maka dari itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah seperti Kabupaten Sumenep dan beberapa kabupaten dengan nilai indeks yang rendah tersebut belum mampu meminimalisir hambatan-hambatan yang

terjadi pada masyarakatnya dalam mengakses jasa keuangan formal, seperti pada industri perbankan. Wilayah-wilayah dengan nilai indeks inklusi keuangan yang rendah juga menunjukkan tingkat kemiskinanannya cukup besar. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur (2014) menunjukkan data bahwa Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Tuban memiliki tingkat presentase kemiskinan yang besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kabupaten Sumenep 21,13% dan Kabupaten Tuban 17,16%. Begitu pula terjadi pada beberapa wilayah lainnya.

### **Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Personal**

Hasil penelitian ini menunjukkan benar bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan personal secara linier positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan indeks inklusi keuangan maka akan terjadi pula peningkatan perilaku keuangan personal pada masyarakat. Inklusi keuangan ini sangat berkaitan dengan akses jasa keuangan. Maka dari itu, penelitian ini telah menjawab bahwa wilayah dengan indeks inklusi keuangan yang tinggi (tidak ada hambatan dalam mengakses jasa keuangan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan jasa keuangan seperti perbankan) menunjukkan perilaku keuangan personal masyarakatnya juga baik. Pada penelitian ini, perilaku keuangan personal yang baik digambarkan dari beberapa indikator, antara lain: membuat anggaran, pendanaan (sumber daya finansial), alokasi anggaran, pengeluaran (penggunaan uang), dan evaluasi penggunaan uang. Maka dari itu, dapat digambarkan bahwa masyarakat yang berada pada wilayah dengan indeks inklusi keuangan yang tinggi dapat dikatakan telah memiliki perilaku keuangan personal yang baik dan mampu dalam mengelola keuangan personal,

khususnya pada indikator-indikator tersebut. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang berada pada wilayah dengan indeks inklusi keuangan yang rendah dapat dikatakan masih belum memiliki perilaku keuangan personal yang baik atau belum mampu mengelola keuangan personal secara bijak.

Pada indikator membuat anggaran, dijelaskan melalui beberapa item yaitu anggaran harian, anggaran bulanan, dan perencanaan keputusan keuangan. Seseorang dengan perilaku keuangan personal yang baik berarti telah mampu secara baik membuat penganggaran (*budgeting*) dalam aktivitas sehari-harinya. Penganggaran tersebut baik dilakukan secara harian maupun bulanan. Selain itu, dia juga mampu dengan baik untuk berpikir secara masak dalam membuat perencanaan-perencanaan keuangan yang akan diputuskan (direalisasikan) dalam beberapa jangka waktu ke depan.

Indikator selanjutnya yaitu indikator pendanaan (sumber daya finansial). Indikator ini dijelaskan oleh item alternatif pendanaan melalui bank. Indikator ini menjelaskan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan akses terhadap industri perbankan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya finansial, baik pada saat memerlukan kebutuhan yang mendesak maupun untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha. Seseorang dengan perilaku keuangan yang tidak baik akan cenderung menggunakan cara-cara yang singkat apabila berada pada posisi keuangan yang terdesak. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan jasa para rentenir yang sebenarnya hal tersebut benar-benar justru akan membuat kondisi keuangannya sengsara pada masa yang akan datang.

Indikator alokasi anggaran. Setelah diketahui jumlah sumber daya finansial yang didapat, maka langkah berikutnya

adalah mengalokasikan sumber daya finansial tersebut untuk beberapa keperluan. Indikator alokasi anggaran ini dijelaskan oleh beberapa item seperti alokasi tabungan, alokasi pengeluaran tak terduga, dan alokasi untuk kebutuhan masa depan. Orang dengan perilaku keuangan yang baik akan mampu mengalokasikan sumber daya finansial yang didapat ke beberapa pos kebutuhan secara tepat. Selain untuk kebutuhan primer sehari-hari, maka sebaiknya seseorang masih mampu menyisihkan pendapatannya untuk tabungan, pengeluaran tak terduga, dan kebutuhan masa depan (masa tua, pendidikan anak, dan sebagainya). Alokasi tabungan dapat digunakan untuk keperluan jangka pendek dengan memanfaatkan produk tabungan melalui tingkat pengembalian bunga bank yang diberikan. Alokasi pengeluaran tak terduga dapat disimpan dalam bentuk kas untuk benar-benar mengantisipasi keperluan yang datangnya sangat mendesak, sedangkan alokasi kebutuhan masa depan dapat menggunakan bentuk-bentuk investasi jangka panjang.

Pada indikator pengeluaran (penggunaan dana), indikator ini menggunakan beberapa item seperti pengeluaran untuk kebutuhan pokok, pengeluaran untuk biaya tagihan (biaya utilitas), pengeluaran dengan lebih memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan, dan pengeluaran yang didasarkan pada anggaran. Seseorang yang memiliki perilaku keuangan personal yang baik seharusnya memang lebih mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan primer dalam berkehidupan sehari-hari. Tidak lebih mementingkan keinginan dalam menggunakan dana juga merupakan hal yang penting, hal ini sering terjadi pada masyarakat yang cenderung konsumtif. Seorang konsumen yang cerdas harus memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Selain itu,

masyarakat dengan perilaku keuangan personal yang baik pasti mampu membayar tagihan utilitas (telepon, listrik, air) dengan tepat waktu. Item selanjutnya yang penting adalah menyesuaikan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat pada awal periode. Apabila dilakukan dengan bijak, maka seseorang akan mampu menjalani hidup tanpa diikuti oleh permasalahan finansial.

Indikator yang terakhir adalah evaluasi penggunaan uang. Indikator ini memiliki beberapa item yaitu evaluasi harian, evaluasi bulanan, dan evaluasi perbandingan dan hasil riil penggunaan uang. Seseorang yang memiliki perilaku keuangan personal yang baik akan selalu mengevaluasi hasil keputusan keuangan yang telah dibuat selama satu periode tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan hasil total pengeluaran dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Apabila tidak sesuai, maka dapat disesuaikan dengan perencanaan dan pembuatan anggaran ke depannya yang lebih baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi inklusi keuangan pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda, beberapa penyebabnya adalah faktor geografis dan demografis. Wilayah dengan indeks inklusi keuangan tinggi ada pada sebagian besar wilayah kota, sedangkan wilayah kabupaten sebagian besar memiliki indeks inklusi keuangan yang. Peneliti ini juga membuktikan secara empiris bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh signifikan secara linier positif terhadap perilaku keuangan personal. Hal ini menunjukkan apabila ada kenaikan indeks inklusi keuangan, maka akan terjadi peningkatan pula pada perilaku keuangan personal dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi beberapa pihak, antara lain: 1) Bagi pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebaiknya lebih memperhatikan pentingnya kondisi akses jasa keuangan secara inklusif. Pemerintah daerah sebaiknya lebih erat bekerja sama dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat kebijakan untuk memperluas akses layanan jasa keuangan perbankan hingga ke pelosok daerah serta sosialisasi cara mengelola keuangan personal yang baik dalam berkehidupan sehari-hari. 2) Bagi industri perbankan, sebaiknya lebih agresif dalam ikut membantu memperluas aksesnya hingga ke pelosok-pelosok daerah yang jauh dari pusat kota, seperti melalui pemanfaatan *branchless banking* (cabang bank tanpa kantor fisik) khususnya pada area yang mayoritas penduduknya adalah *unbanked people*. 3) Bagi masyarakat secara umum, sebaiknya mampu berpikir lebih dewasa dalam mengelola keuangan personal. Salah satunya adalah tidak membiasakan hidup secara konsumtif, kemudian juga dengan memanfaatkan secara optimal akses perbankan yang sudah ada melalui pemanfaatan produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan kredit. 4) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mampu meneruskan keterbatasan yang ada dalam melaksanakan penelitian ini. Jangkauan populasi sebaiknya lebih luas dan data-data yang dikumpulkan untuk menghitung indeks inklusi keuangan sebaiknya dilengkapi, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengembangkan rumus perhitungan indeks inklusi keuangan yang baru dengan mempertimbangkan banyak aspek tambahan, antara lain kantor fisik (pusat, cabang, cabang pembantu, kas, ATM) dan layanan virtual (*mobile banking* dan *internet banking*). Selain itu peneliti

selanjutnya sebaiknya juga dapat menjabarkan indikator-indikator tambahan untuk mengukur tingkat perilaku keuangan personal supaya mampu mengkonstruksi variabel tersebut secara lebih detail.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Amol. 2008. *Economic Research: The Need for Financial Inclusion with an Indian Perspective*. IDBI Gilts Paper, Mumbai, India
- Agus Sugiarto. 2014. *Strategi Nasional Literasi Keuangan*. Diambil dari materi seminar OJK. (Online). <http://ikatanbankir.com/uploads/seminar/LKD-Final8May2014.pptx>, diakses pada tanggal 5 Desember 2014
- Allen, Franklin., Kunt, Asli Demirguc., Klapper, Leora., Martinez Peria, Maria Soledad. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion, Understanding Ownership and Use of Formal Account*. The World Bank
- Ardiani Ika S. 2011. *Personality Traits sebagai Penentu Perencanaan Keuangan Keluarga (Suatu Kajian Pustaka)*. *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11, No. 2, Agustus 2011, Hal. 118-126
- Bank Dunia. 2014. *Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat: World Bank*. (Online). <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports>, diakses pada tanggal 5 Desember 2014
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia*. Malang
- \_\_\_\_\_.2014. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah*. Malang
- Bintan Badriatul Ummah. 2013. Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan dengan Pembangunan di ASIA. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI. 2014. *Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia*. Jakarta
- BPS Kabupaten Bangkalan. 2014. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2013*. Kabupaten Bangkalan
- BPS Kabupaten Banyuwangi. 2014. *PDRB Kabupaten Banyuwangi 2013*. Kabupaten Banyuwangi
- BPS Kabupaten Bojonegoro. 2014. *PDRB Kabupaten Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kabupaten Bojonegoro
- BPS Kabupaten Blitar. 2014. *PDRB Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2010-2013*. Kabupaten Blitar
- BPS Kabupaten Jember. 2014. *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013*. Kabupaten Jember
- BPS Kabupaten Jombang. 2014. *PDRB Kabupaten Jombang 2014*. Kabupaten Jombang
- BPS Kabupaten Gresik. 2014. *PDRB Gresik Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kabupaten Gresik
- BPS Kabupaten Kediri. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*. Kabupaten Kediri
- BPS Kabupaten Lamongan. 2014. *PDRB Lamongan Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*. Kabupaten Lamongan
- BPS Kabupaten Lumajang. 2014. *PDRB Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kabupaten Lumajang
- BPS Kabupaten Madiun. 2014. *PDRB Kabupaten Madiun 2010-2013*. Kabupaten Madiun

- BPS Kabupaten Magetan. 2014. *PDRB Kabupaten Magetan 2009-2013*. Kabupaten Magetan
- BPS Kabupaten Malang. 2014. *PDRB Kab. Malang 2014 (2008-2013)*. Kabupaten Malang
- BPS Kabupaten Mojokerto. 2014. *PDRB Kabupaten Mojokerto 2010-2013*. Kabupaten Mojokerto
- BPS Kabupaten Nganjuk. 2014. *PDRB Nganjuk Menurut Lapangan Usaha 2013*. Kabupaten Nganjuk
- BPS Kabupaten Ngawi. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi 2009-2013*. Kabupaten Ngawi
- BPS Kabupaten Pasuruan. 2014. *PDRB Kabupaten Pasuruan Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*. Kabupaten Pasuruan
- BPS Kabupaten Ponorogo. 2014. *PDRB Ponorogo Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*. Kabupaten Ponorogo
- BPS Kabupaten Sidoarjo. 2014. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2013*. Kabupaten Sidoarjo
- BPS Kabupaten Sumenep. 2014. *PDRB Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2013*. Kabupaten Sumenep
- BPS Kabupaten Tuban. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tuban 2010-2013*. Kabupaten Tuban
- BPS Kabupaten Tulungagung. 2014. *PDRB Kabupaten Tulungagung 1999-2013*. Kabupaten Tulungagung
- BPS Kota Batu. 2014. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan Kota Batu Tahun 2011-2013*. Kota Batu
- BPS Kota Blitar. 2014. *PDRB Kota Blitar 2009-2013*. Kota Blitar
- BPS Kota Kediri. 2014. *PDRB Kota Kediri Tahun 2013*. Kota Kediri
- BPS Kota Madiun. 2014. *PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kota Madiun
- BPS Kota Malang. 2014. *PDRB Kota Malang Tahun 2013*. Kota Malang
- BPS Kota Mojokerto. 2014. *PDRB Kota Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013*. Kota Mojokerto
- BPS Kota Pasuruan. 2014. *PDRB Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kota Pasuruan
- BPS Kota Probolinggo. 2014. *PDRB Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kota Probolinggo
- BPS Kota Surabaya. 2014. *PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*. Kota Surabaya
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2014. *Geografi dan Iklim, Topografi, Gunung dan Sungai*. (Online). <http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=1>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014
- \_\_\_\_\_. 2014. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013*. Surabaya
- Chakravarty, Satya R. dan Rupayan Pal. 2010. *Measuring Financial Inclusion: An Axiomatic Approach*. Laporan Hasil Penelitian. Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR). Mumbai India
- Dewi Rachmat Kusuma. 2014. *Melek Keuangan Masyarakat Indonesia Masih di Bawah Singapura dan Malaysia*. (Online). <http://finance.detik.com/read/2014/07/02/112202/2625308/5/melek-keuangan-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-singapura-dan->

- malaysia, diakses pada tanggal 19 Januari 2015
- Finansialku. 2014. *5 Perilaku Mengelola Keuangan yang Sehat*. (Online). <http://www.finansialku.com/5-perilaku-mengelola-keuangan-yang-sehat/> diakses pada tanggal 11 Januari 2015
- Ida dan Cinthia Yohana Dwinta. 2010. Pengaruh *Locus of Control, Financial Knowledge, Income* terhadap *Financial Management Behavior*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No. 3, Desember 2010, Hal. 131-144
- Kapoor, Jack R., Dlabay, Les R., Hughes, Robert J., Hoyt, William B. 2007. *Business and Personal Finance*. California: McGraw-Hill
- Kementerian Kesehatan. 2014. *Estimasi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014*. Jakarta
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2014. *Sesmenko Kesra: Indeks Kesejahteraan Rakyat Indonesia Meningkat*. (Online). <http://www.kemendikpora.go.id/artikel/sesmenko-kesra-indeks-kesejahteraan-rakyat-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 3 Desember 2014
- Macroeconomic Dashboard. 2014. *Perkembangan Ekonomi Terkini 2014*. (Online). <http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/166-perkembangan-ekonomi-terkini>, diakses pada tanggal 3 Desember 2014
- Musahadah. 2014. *Konsumerisme di Kalangan Pelajar Tinggi*. (Online). <http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/23/konsumerisme-di-kalangan-pelajar-tinggi>, diakses pada tanggal 14 Januari 2015
- Nababan, Darman dan Isfenti Sadalia. 2013. Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Rakhmindyarto dan Syaifullah. 2014. *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Jakarta
- Sarma, Mandira. 2012. *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development
- Sri Wahyunik. 2014. *Perlunya Pintar Mengatur Keuangan Sejak Dini*. (Online). <http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/05/perlunya-pintar-mengatur-keuangan-sejak-dini>, diakses pada tanggal 29 Januari 2015
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Wibowo. 2014. *Mendekat ke Publik*. (Online). <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/21/334656/mendekat-ke-publik>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.